

SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH DALAM MENDUKUNG SASARAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2018

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas**

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis K/L dengan Daerah
dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal RKP 2018

Makassar, 1 Maret 2017

1

PENGANTAR

- ◆ Dalam UU No.25 Tahun 2004, disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk:
 - Mendukung **koordinasi antarpelaku pembangunan**
 - Menjamin **terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah.**

- ◆ Pencapaian **sasaran dan prioritas pembangunan nasional**:
 - Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri,
 - Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, spt pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni, dll.
 - ❖ Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka **sasaran prioritas pembangunan nasional** harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

- ◆ Dalam UU No.23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa **koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.**

- ◆ **Desentralisasi politik dan fiskal saat ini sudah berjalan cukup baik.**
 - Desentralisasi fiskal → peningkatan dana transfer ke daerah serta pengelolaan yang diberikan kepada daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - Desentralisasi politik → pemilihan kepala daerah secara serentak → pemberian sebagian kewenangan pusat kepada daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan.
 - Desentralisasi administratif → pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah.
- ◆ **Desentralisasi ekonomi masih belum sepenuhnya terlaksana secara baik.**
 - Desentralisasi ekonomi belum berjalan dengan baik.
 - Pembangunan daerah tidak dapat dikelola secara *business as usual*. Perlu inovasi daerah baik dari masyarakat maupun pemimipin.
 - Analisis ekonomi secara baik untuk melihat potensi dan keunggulan daerah.
 - Kerjasama antar Daerah
- ◆ **Peran Kooridasi Perencanaan sangat diperlukan tidak hanya sebagai penentu arah, namun juga kecepatan dan kualitas pembangunan.**
 - Pembangunan tidak hanya sebatas pada pengembangan potensi daerah, namun dalam perencanaan juga mempertimbangkan seberapa cepat suatu pembangunan dapat dilaksanakan serta berkualitas (pembangunan inklusif yaitu menurunkan kemiskinan dan pengangguran serta merata baik secara wilayah maupun individu).
 - Memperhitungkan berbagai sumber pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD saja, namun juga APBN, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta pembangunan oleh pihak swasta (proyek yang menguntungkan secara ekonomi, finansial serta bisnis)
 - Melakukan sinergi perencanaan pusat dan daerah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan.

- ◆ Penyusunan RKP 2018 didasarkan pada kebijakan *money follow program* yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan *Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial*.
- ◆ **Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran Pemerintah Provinsi** sebagai wakil pemerintah pusat di daerah **dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional** yang ditujukan untuk:
 - Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD);
 - Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD);
 - Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan).
- ◆ Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah → forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional) → sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RKP.
- ◆ Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional → forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional) → sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKP.

2

RANCANGAN RKP 2018

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018

- Memperbaiki **Kualitas Belanja**.
- Peningkatan **iklim usaha dan iklim investasi** yang lebih kondusif
- Peningkatan **daya saing dan nilai tambah** industri
- Peningkatan **peran swasta** dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur



**Memprioritaskan Belanja Pemerintah
Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas
Nasional**

Peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial

RKP 2015*)	RKP 2016	RKP 2017	RKP 2018	RKP 2019
Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas	Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah	MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN	<i>Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019</i>

RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018

Revolusi Mental

Kesetaraan Gender

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

V. KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN

15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l. Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi

Perubahan Iklim

Pemerataan

Tata kelola Pemerintahan yang Baik

[Dashed box] = contoh penajaman prioritas dari slide sebelumnya

[Dotted box] = *Highlight* prioritas pada slide selanjutnya

[Solid box] = Pengarusutamaan/Mainstreaming

Komponen Sisi Pengeluaran	Pertumbuhan Tahun 2018 (%)	
	Baseline	Skenario
PDB	5,2	6,1
- Konsumsi RT	5,2	5,4
- Konsumsi LNPRT	8,5	9,6
- Konsumsi Pemerintah	4,6	5,3
- Investasi (PMTB)	5,5	8,0
- Ekspor	1,7	2,2
- Impor	1,7	2,6

Konsumsi dan investasi harus menjadi pendorong pertumbuhan
Kebutuhan Investasi: Rp 5.356,5 T



Konsumsi pemerintah akan relatif terbatas seiring ruang fiskal yang sempit, dan prioritas pada alokasi belanja modal



Komponen Sisi Produksi	Pertumbuhan (%)	Share (%)	Sumber Pertumbuhan (%)
PDB	6,1	100	6,1
- Industri Pengolahan	5,7	20,2	1,2
- Konstruksi	8,5	11,8	0,9
- Perdagangan	6,3	13,1	0,8
- Informasi dan Komunikasi	11,9	3,7	0,6
- Jasa Keuangan	11,5	4,5	0,5
- Pertanian	4,0	12,8	0,5
- Transportasi	8,2	5,5	0,3
- Listrik dan Gas	6,1	1,2	0,06



Industri pengolahan



Pertanian



Pariwisata

3 Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah:

TARGET PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TAHUN 2018

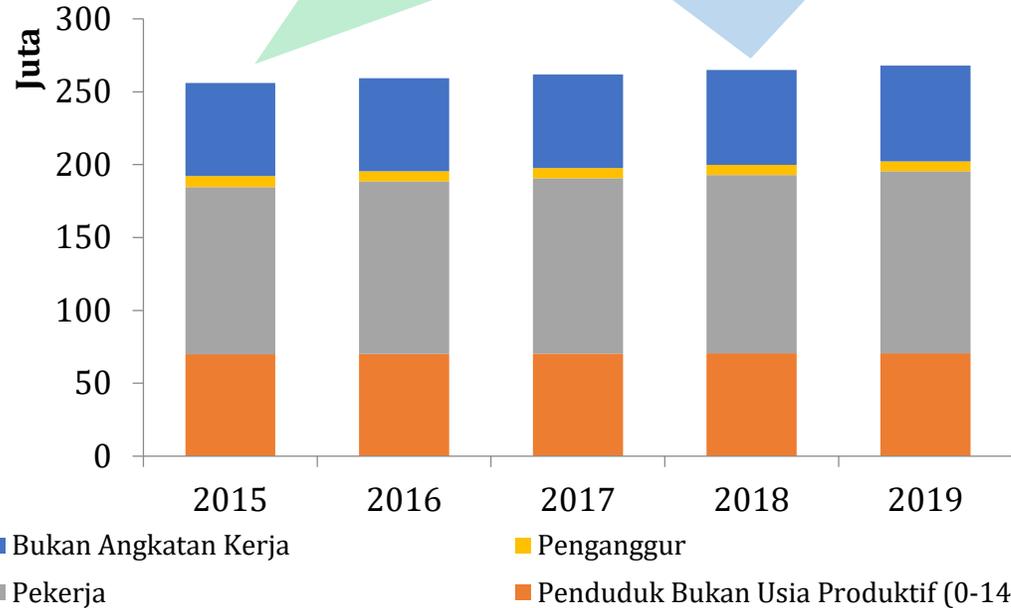
TAHUN 2016

Jumlah penduduk miskin sekitar 27,8 juta jiwa
(Sumber: BPS, Sept 2016)

Jumlah penduduk berdasarkan SUPAS 2015 = 255,18 juta jiwa

Jumlah penduduk berdasarkan proyeksi = 265,02 juta jiwa

TAHUN 2018



Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14): 70,5 juta



Penduduk Usia Produktif (15+): 194,5 juta



Angkatan Kerja: 129,4 juta



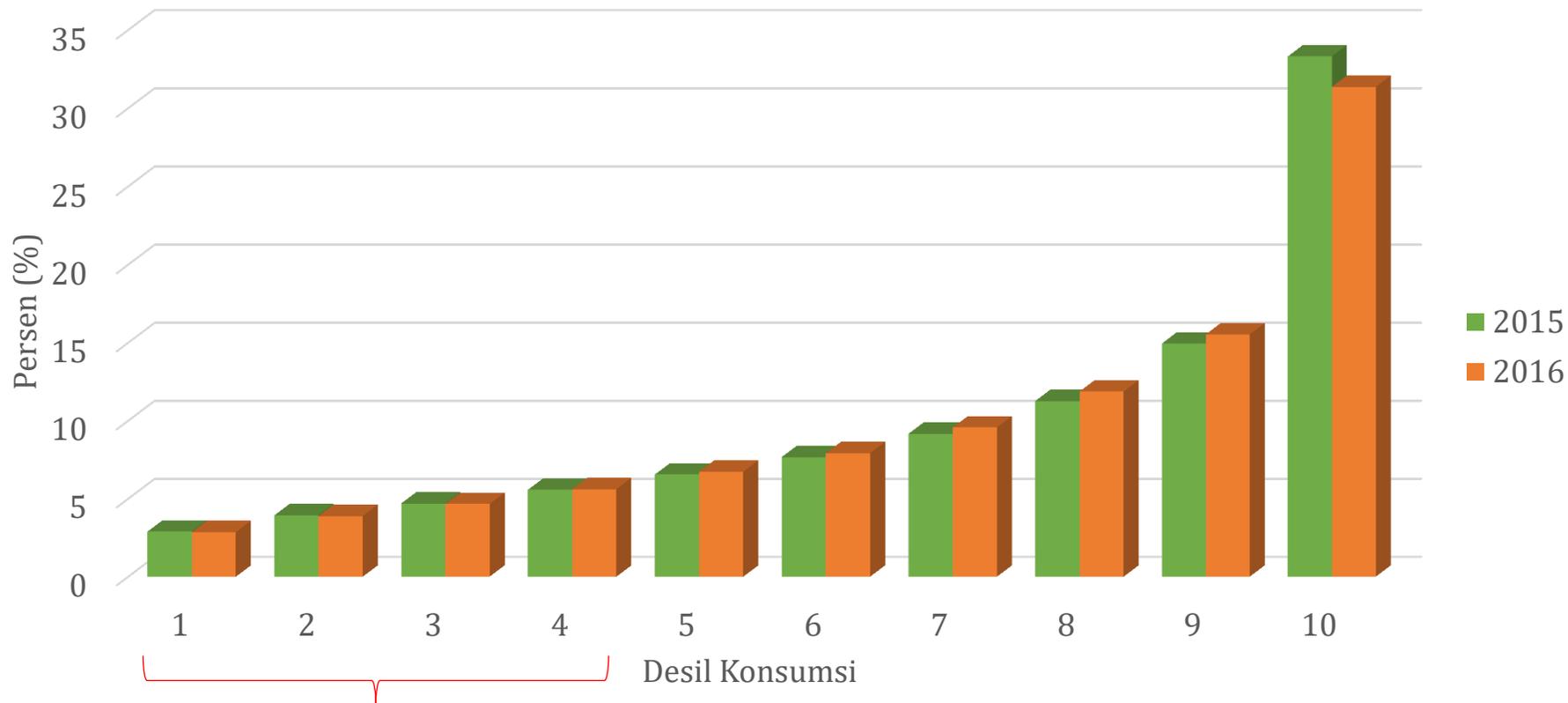
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperkirakan 67%

TARGET PEMBANGUNAN 2018

- Target tingkat kemiskinan: 9-10%
- Target tingkat pengangguran terbuka: 5,3-5,5%
- Target rasio gini: 0,38

Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun

FOKUS PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Penduduk Berpendapatan 40% Terbawah



Penduduk 40% dengan tingkat pendapatan terbawah : 93 juta jiwa

Keterangan: Desil 1 = 10% penduduk dengan pendapatan terbawah
Desil 10 = 10% penduduk dengan pendapatan teratas

- Perbandingan *share* konsumsi per kapita penduduk tahun 2015 dan 2016 telah menunjukkan peningkatan pada desil 5-9, dan penurunan yang cukup besar di desil 10.
- Hal ini menyumbang pada penurunan gini rasio di tahun 2016 menjadi 0,397.
- Namun perubahan pola konsumsi tidak terjadi pada 4 desil terbawah. Fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2015-2019: Perkembangan Ekonomi Makro

On track/on trend dalam Mencapai Target 2019 ●

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)					
Target RPJMN	5	4	4	3,5	3,5
Target RKP	4,4	3,0-5,0	4	4	
Realisasi	3,35	3,02			

Sangat Sulit Mencapai Target 2019 ●

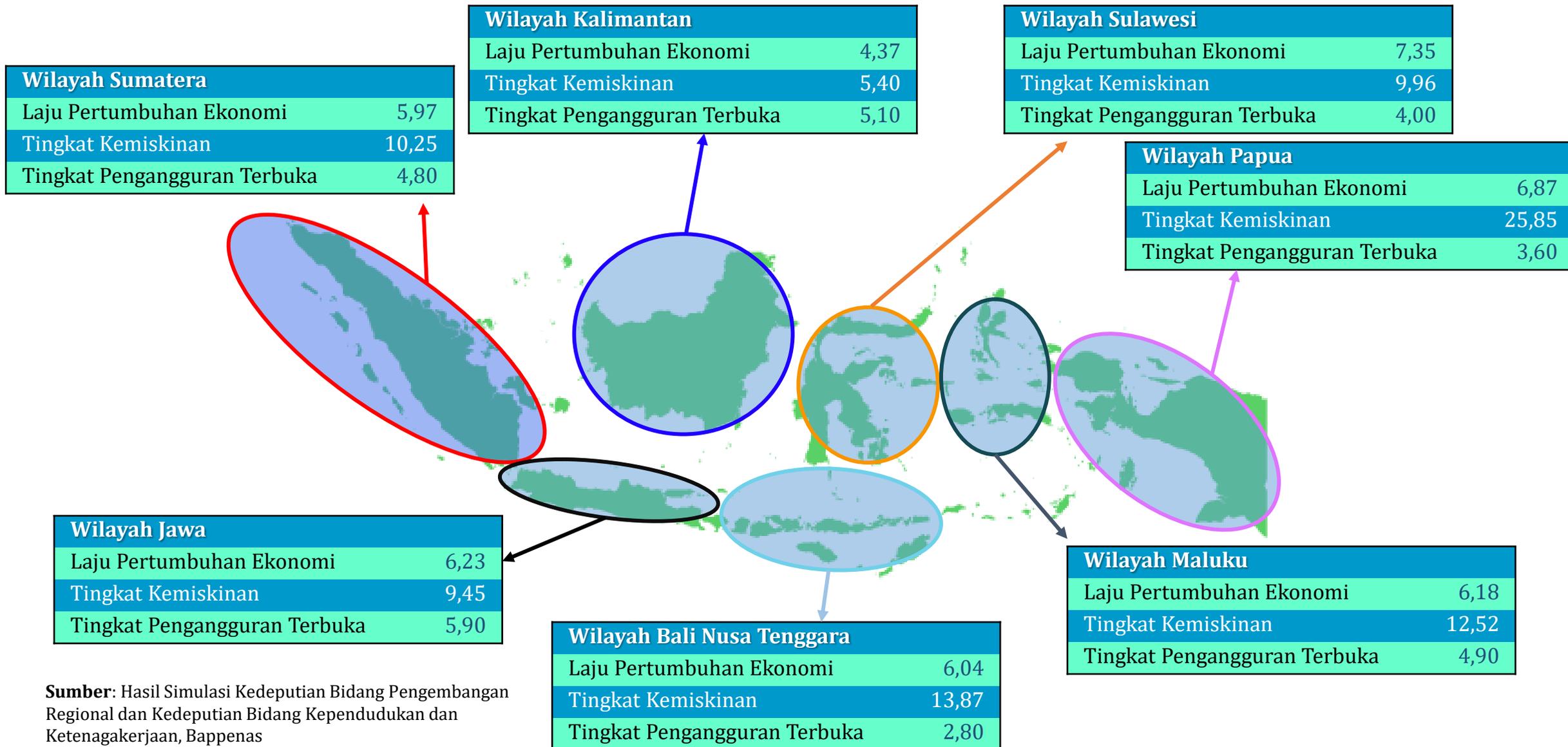
INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Pajak/PDB (%)					
Target RPJMN	13,2	14,2	14,6	15,2	16
Target RKP		13,1-13,2	12		
Realisasi	10,7	10,7			
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)					
Target RPJMN	8	9,9	11,9	13,7	14,3
Target RKP	6,8	7,2-8,5			
Realisasi	-9,98	-3,11			
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)					
Target RPJMN	6,1	7,1	10,2	11,7	12,3
Target RKP	5,9	7,1			
Realisasi	-12,67	-1,47			

Perlu Kerja Keras untuk Mencapai Target 2019 ●

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan PDB (%)					
Target RPJMN	5,8	6,6	7,1	7,5	8
Target RKP	5,5-6,0	5,8-6,2	5,5-5,9	6,1	
Realisasi	4,79	5			
PDB per Kapita (ribu Rp)					
Target RPJMN	47.804	52.686	58.489	64.721	72.217
Target RKP		50.020-50.154			
Realisasi	45.176	48.072			
Tingkat Pengangguran (%)					
Target RPJMN	5,5-5,8	5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0
Target RKP	5,5-5,7	5,2-5,5	5,1-5,4	5,3-5,5	
Realisasi	6,18	5,61			
Tingkat Kemiskinan (%)					
Target RPJMN	9,5-10,5	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0
Target RKP	9,0-10,0	9,0-10,0	9,5-10,5	9,0-10,0	
Realisasi	11,13	10,7			
Rasio Gini					
Target RPJMN	0,41	0,39			0,36
Target RKP		0,39	0,38	0,38	
Realisasi	0,408	0,397			

KONTRIBUSI PEMBANGUNAN WILAYAH PER PULAU TAHUN 2018

Untuk Mendukung Pertumbuhan Nasional 6,1 Persen



Sumber: Hasil Simulasi Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas

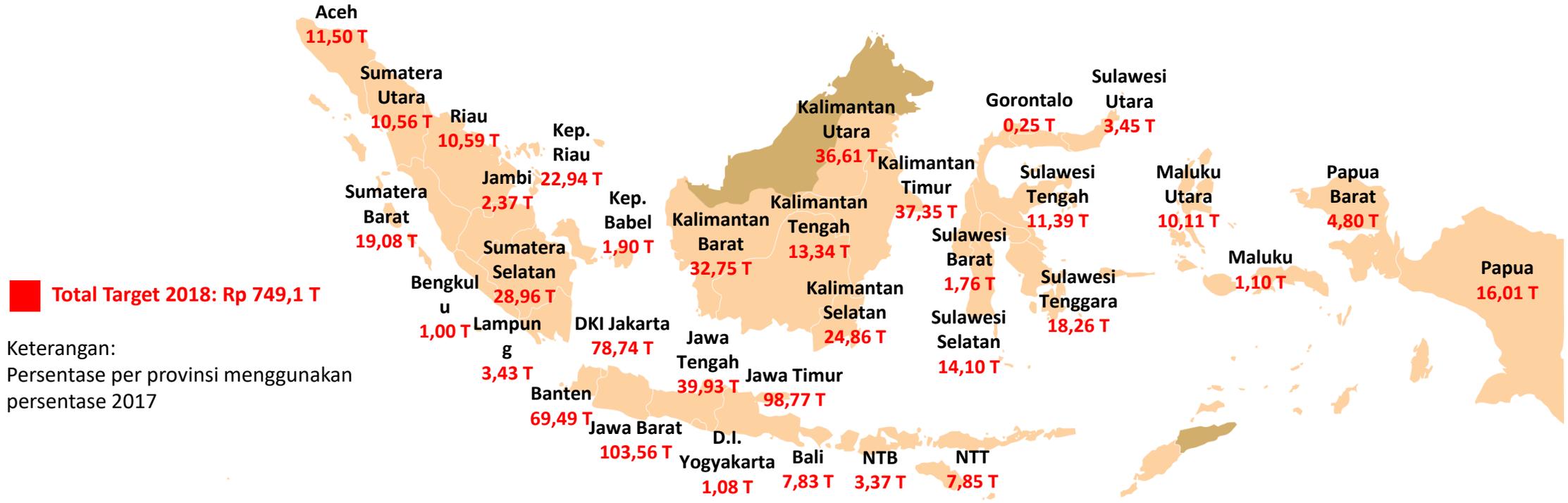
UPAYA DAN LANGKAH KONKRIT

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 6,1 Persen

Berbagai upaya kerja keras dan langkah konkrit bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah meliputi :

- ◆ **Pertama**, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur transportasi dan logistik; dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (*leverage*) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pariwisata.
Namun, dengan keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP), yang perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur
- ◆ **Kedua**, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana rapatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural.

SASARAN PERKUATAN INVESTASI



Sasaran	2014 Baseline	2015	2016	2017	2018	Sasaran Akhir RPJMN
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,6	5,1	5,2	6,0-6,6	8,0	12,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	463,1	519,5	594,8	631,5	749,1	933,0
Kontribusi PMDN (%)	33,7	33,8	35	36,3	37,6	38,9

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG KESELURUHAN PRIORITAS NASIONAL

Penyediaan Pelayanan Dasar

-  Akses Air Minum 100%
-  Akses Sanitasi 100%
-  Rasio Elektrifikasi 96.6%
-  Akses Perumahan Layak Huni
-  Aksesibilitas Perbatasan & Tertinggal
-  Keamanan dan Keselamatan Transportasi
-  Pengendalian Banjir

Infrastruktur Mendukung Sektor Unggulan

Konektivitas

Tol Laut + intermoda

Pengembangan Wilayah/Pusat Pertumbuhan

Pengembangan Wilayah/Pusat Pertumbuhan

Tol Laut

Kawasan Terbangun **Area Pelabuhan** **Area Pelabuhan** **Antarmoda** **Antarmoda** **KTI / Tertinggal**

Pembangunan TIK:

- Palapa Ring
- Rencana pita lebar: E-government, E-pendidikan, E-Kesehatan, E-commerce, E-logistik, E-pengadaan

Pembangunan Energi 35 GW

- Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini Vietnam 1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400 kWh/Kap.)

Sektor Unggulan



Infrastruktur Perkotaan

-  Membangun Angkutan Massal Berbasis Jalan, Rel & Intermoda
-  Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan

Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan

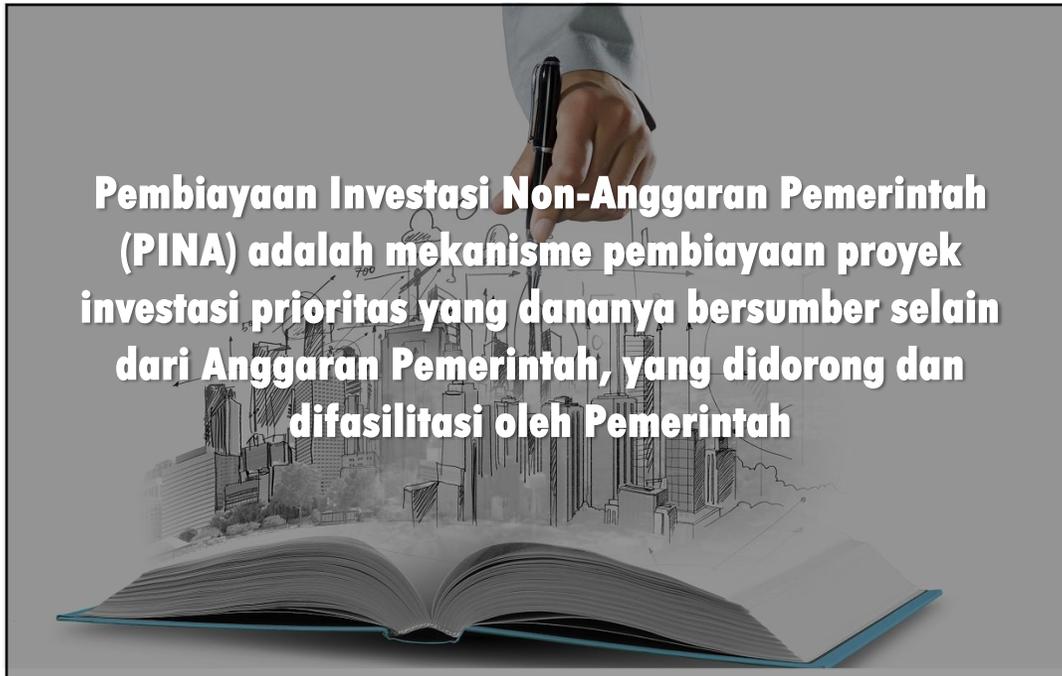


<i>Avoid</i>	<i>Shift</i>	<i>Improve</i>
Jaringan yang Mendukung Efisiensi Perjalanan	Peningkatan Pangsa Angkutan Umum	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

-  Mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan
-  Energi untuk Transportasi Perkotaan

 Mengembangkan infrastruktur perkotaan melalui pemanfaatan TIK untuk menuju kota cerdas

PINA SEBAGAI UPAYA KHUSUS UNTUK MENDORONG INVESTASI NON ANGGARAN PEMERINTAH



Investasi yang bersumber dari Non-Anggaran Pemerintah terutama sektor infrastruktur **tidak dapat diharapkan terjadi dengan sendirinya**. Diperlukan **upaya khusus** untuk mengoordinasikan dan mendorong Para Pihak terkait.

Pelaksanaan **upaya khusus** dimaksud disebut dengan **Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)**, yang meliputi:

	merencanakan dan menetapkan <u>Proyek Investasi Prioritas</u> ;
	merekomendasikan penugasan pelaksanaan <u>Proyek Investasi Prioritas</u> kepada BUMN tertentu bilamana dipandang perlu;
	mengkoordinasikan dan mendorong Para Pihak terkait dalam rangka percepatan persiapan dan pelaksanaan <u>Proyek Investasi Prioritas</u> ;
	melakukan intermediasi antara <u>Penanam Modal (Investor)</u> dan <u>Penerima Modal (Investee)</u> jika diperlukan oleh Para Pihak

SKEMA PEMBIAYAAN INVESTASI NON ANGGARAN PEMERINTAH: Potensi *capital gain* saat *investment recycle* proyek *Brownfield*

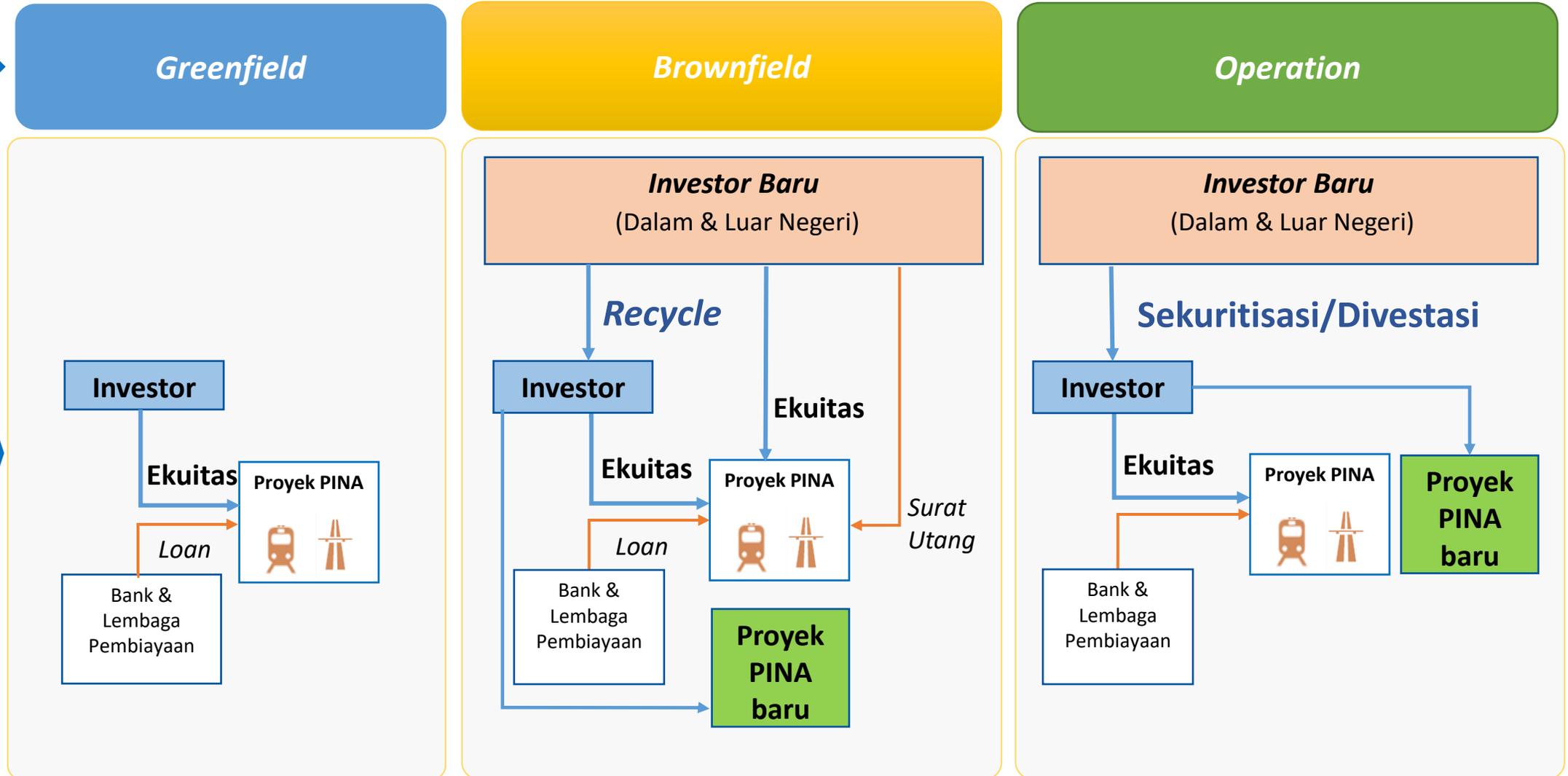
Kondisi
Proyek

Greenfield

Brownfield

Operation

Skema
Pembiayaan



PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAPAT BERSIFAT 'ESTAFET'

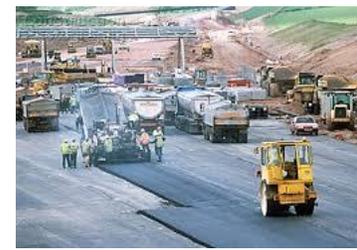
← Greenfield → ← Brownfield →



Project Idea



Persiapan



Konstruksi



Stabilisasi



Operasi (Kapasitas Penuh)

Mature

ILUSTRASI



EKUITAS

- *Equity internal minimum*

- *Equity financing*
- *RDPT*

- *Convertible Loan*
- *Private Placement*

- *IPO*
- *Convertible Loan*

DEBT

- *Corporate Loan*

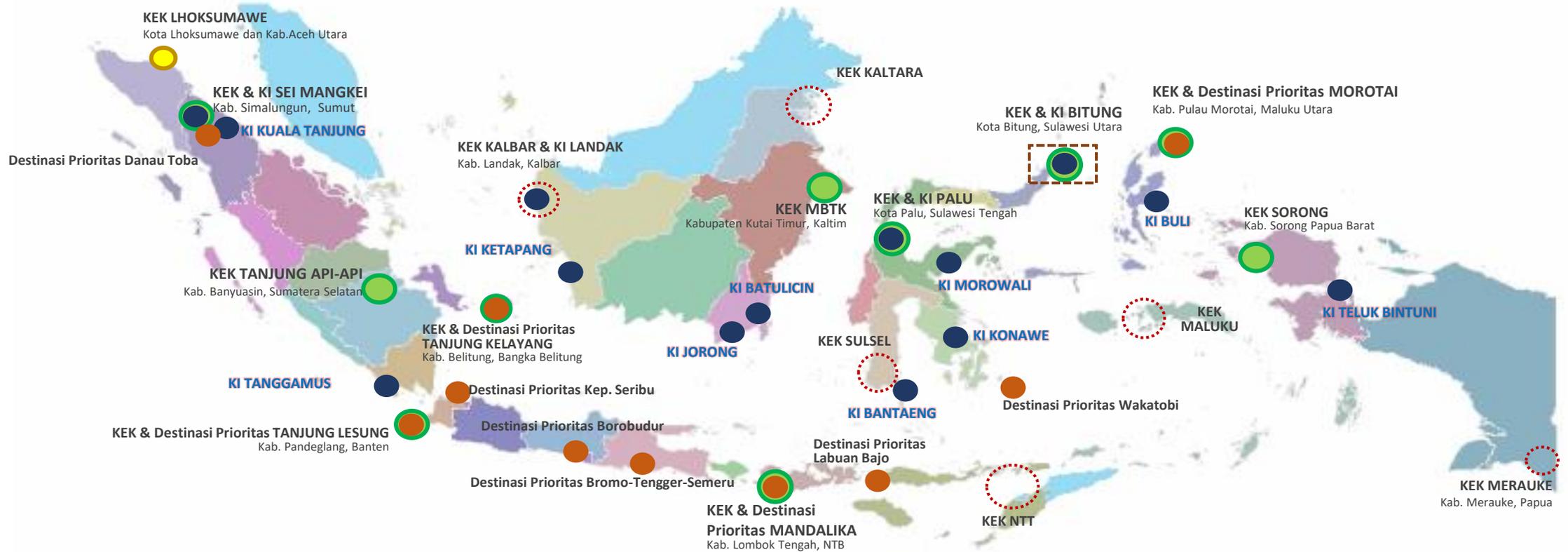
- *MTN*
- *Construction Loan*
- *SBLC/SKBDN*
- *Project Loan*
- *Project Bond*

- *MTN*
- *Project Bond*

- *Project Bond*

- ✓ *Investor tidak harus jangka panjang*
- ✓ *Regulasi dan Kebijakan yang supportif akan menstimulasi dana di sektor infrastruktur*

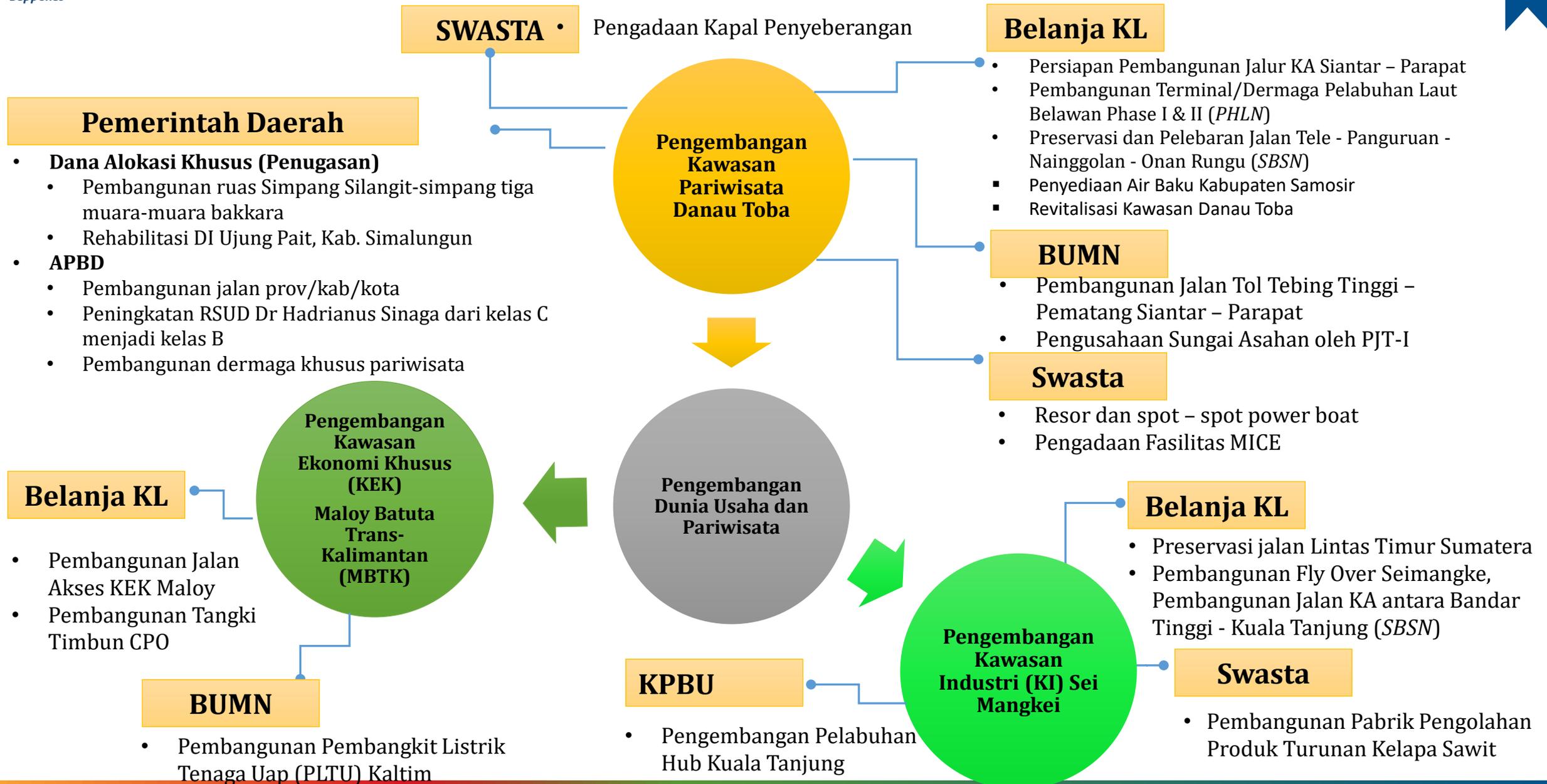
PERSEBARAN KAWASAN INDUSTRI, KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN KAWASAN PARIWISATA



Keterangan:

-  Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai Oktober 2016
-  Usulan Indikasi Lokasi KEK berdasarkan RPJMN 2015 -2019
-  Usulan Lokasi KEK berdasarkan komitmen Presiden
-  Lokasi 14 Kawasan Industri
-  Lokasi 10 Destinasi Prioritas Pariwisata

Contoh Pada Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Pariwisata



RANCANGAN BIDANG DAK FISIK TA 2018

DAK REGULER		DAK AFIRMASI	DAK PENUGASAN
Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan		Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (<i>Area/Spatial Based</i>).	Tujuan: Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
1. Pendidikan	10. Pariwisata	1. Kesehatan (Puskesmas)	1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan dan KB	11. Jalan	2. Perumahan dan Permukiman	2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)
3. Air Minum		3. Transportasi	3. Air Minum
4. Sanitasi		4. Pendidikan	4. Sanitasi
5. Perumahan dan Permukiman		5. Air Minum	5. Jalan
6. Pasar		6. Sanitasi	6. Irigasi
7. IKM			7. Pasar
8. Pertanian			8. Energi Skala Kecil
9. Kelautan dan Perikanan			9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terdapat **penambahan 4 bidang DAK Reguler baru** yaitu **Air Minum dan Sanitasi** untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta **Pasar dan Jalan** untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan.

Terdapat penambahan **3 bidang DAK Afirmasi baru** yaitu **Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi**, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci.

Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017, terdapat penambahan **1 bidang DAK** dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya berada di bawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017.

Terdapat bidang – bidang yang kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK, namun berbeda dalam fokus menu kegiatan dan lokasinya.

3

SINERGI PUSAT DAN DAERAH



Pelaksanaan Rakortek dapat menjembatani koordinasi antara Pusat dan Daerah terkait dukungan terhadap Proyek Prioritas Nasional sebagai masukan saat penyusunan Rancangan Awal RKP 2018.

- **Bagi Pemerintah Pusat :**

1. Dapat membahas penjabaran sasaran nasional dengan pemerintah daerah.
2. Dapat melakukan konfirmasi terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan Proyek Prioritas Nasional (termasuk masing-masing Proyek K/L)
3. Memperoleh informasi terkait dukungan pemerintah daerah melalui APBD dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional.
4. Memperoleh masukan terkait usulan kegiatan dan pendanaan melalui APBN untuk mendukung prioritas nasional baik kewenangan pusat maupun daerah.



- **Bagi Pemerintah Daerah:**

1. Dapat memperoleh informasi lebih awal mengenai rancangan rencana pembangunan yang akan menjadi bagian dalam Rancangan Awal RKP 2018 sehingga dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (2018)
2. Dapat melakukan konfirmasi dan mempersiapkan dukungan daerah lebih awal terkait pencapaian sasaran nasional, khususnya sasaran yang merupakan agregasi dari seluruh sasaran daerah.
3. Dapat melakukan konfirmasi terkait kesiapan lokasi pelaksanaan kegiatan Proyek Prioritas Nasional
4. Dapat menyampaikan dan mendiskusikan lebih awal terkait usulan pemerintah daerah yang dibiayai APBN untuk mendukung prioritas nasional baik kewenangan pusat maupun daerah.

4

PENUTUP

- ◆ Pelaksanaan Rakortek Pusat – Daerah yang masuk dalam salah satu tahapan penyusunan RKP 2018 dan merupakan bagian dari amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang ditujukan untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- ◆ Pelaksanaan Rakortek Pusat – Daerah lebih difokuskan pada pembahasan Prioritas Nasional, sekaligus peran pemerintah daerah dalam mendukung integrasi perencanaan dan penganggaran sesuai prinsip *Money Follow Program*.
- ◆ Pelaksanaan Rakortek Pusat-Daerah dapat mendukung penguatan penyusunan perencanaan di Pusat khususnya terkait dengan aspek lokasi (spasial) serta kesiapan pelaksanaan pembangunan.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH